

Daftar Isi

No.	Judul Berita	Media Sumber	Page
1.	ESDM Putuskan Harga Acuan Batu Bara Februari 2025 Naik 0,19%	katadata.co.id	2
2.	Menteri Bahlil Jelaskan Soal Status Ekspor Konsentrat Amman Mineral (AMMN)	ekonomi.bisnis.com	4
3.	Babak Baru Pengelolaan BUMN, Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini di Istana Negara	economy.okezone.com	6
4.	Bahlil: Kampus Jadi Penerima Manfaat Tambang, tetapi Bukan CSR	bloombergtechnoz.com	9

ESDM Putuskan Harga Acuan Batu Bara Februari 2025 Naik 0,19%

HARGA batu bara acuan dengan kalori tertinggi pada Februari 2025 naik 0,19% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi US\$ 124,24 per ton. Kenaikan ini melanjutkan tren positif sejak Desember 2024.

Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 67.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk Bulan Februari 2025. Dalam keputusan tersebut, harga batu bara acuan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

- HBA dengan nilai kalor 6.322 kilo kalori (kcal) per kilogram (kg) GAR naik 0,19% dibandingkan Januari 2024 dari US\$ 124,01 per ton menjadi US\$ 124,24 per ton
- HBA I dengan nilai kalor 5.300 kcal per kg GAR turun 2,01% dari US\$ 83,95 per ton menjadi US\$ 82,26 per ton.
- HBA II dengan nilai kalor 4.100 kcal per kg GAR turun 4,23% dari US\$ 52,75 per ton menjadi US\$ 50,52 per ton.
- HBA III dengan nilai kalor 3.400 kcal per kg GAR turun 0,92% dari US\$ 34,70 per ton menjadi US\$ 34,38 per ton.

Batu bara dengan nilai kalor tertinggi, yaitu 6.322 kcal per kg GAR, menjadi acuan harga jual untuk penyediaan listrik dan bahan bakar di industri, kecuali industri pengolahan dan pemurnian mineral logam.

Harga Mineral Acuan

Selain HBA, Menteri ESDM juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral sebagai patokan Januari 2025. Untuk nikel dipatok US\$ 15.276,11 per metrik ton kering (dmt), harganya turun 2,45% dibandingkan Januari 2024.

Harga acuan untuk kobalt US\$ 24.300 per dmt dan timbal US\$ 1.927,97 per dmt. Adapun HMA untuk komoditas mineral logam lainnya adalah sebagai berikut:

- Seng: US\$ 2.896,25 per dmt
- Aluminium: US\$ 2.531,97 per dmt
- Tembaga: US\$ 8.895,14 per dmt
- Emas sebagai mineral ikutan: US\$ 2.651,38 per troy ounce
- Perak sebagai mineral ikutan: US\$ 29,85 per troy ounce
- Ingot timah Pb 300: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
- Ingot timah Pb 200: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
- Ingot timah Pb 100: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
- Ingot timah Pb 050: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
- Ingot timah 4NINE: settlement price ICDX dan JFX pada hari penjualan
- Logam emas: LBMA Gold PM Fix pada hari penjualan
- Logam perak: LBMA Silver Fix pada hari penjualan
- Mangan: US\$ 2,98 per dmt
- Bijih besi laterit/hematit/magnetit: US\$ 1,44 per dmt
- Bijih krom: US\$ 6,37 per dmt
- Konsentrat ilmenit: US\$ 6,92 per dmt
- Konsentrat titanium: US\$ 10,65 per dmt. Editor: Sorta Tobing

Sumber: katadata.co.id

Menteri Bahlil Jelaskan Soal Status Ekspor Konsentrat Amman Mineral (AMMN)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan beralih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

"Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

"Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini," ungkapnya.

Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target

produksi 220.000 ton katoda tembaga.

Lampu Hijau untuk Freeport

Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024. Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

"Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM," kata Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

"Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi," terangnya. Editor : Anggara Pernando

Sumber: ekonomi.bisnis.com

Babak Baru Pengelolaan BUMN, Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini di Istana Negara

BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap diresmikan hari ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, pukul 10.00 WIB.

Peresmian Danantara

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, peluncuran itu akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangan tertulisnya.

Yusuf menjelaskan, peluncuran Danantara ini menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara. Di sisi lain, hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita.

“Yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” jelasnya.

Calon Bos Danantara

Di tengah rencana peluncuran Danantara, muncul tiga nama yang dikabarkan mengisi posisi pimpinan BPI Danantara. Nama-nama yang mencuat di antaranya Rosan Roeslani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Kabarnya Rosan akan mengisi posisi Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara.

Lalu, Dony Oskaria yang kini memegang bangku Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Paman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini diisukan jadi Chief Operating Officer (COO).

Nama lain adalah Pandu Sjahrir yang digadang-gadang ditunjuk Presiden sebagai Chief Information Officer (CIO) BPI Danantara.

Sementara itu, Ketua Danantara Muliaman Hadad dikabarkan akan menjadi dewan pengawas Badan Pengelola Investasi.

Modal Danantara

Dalam menjalankan tugasnya, BPI Danantara tetap mendapat suntikan penyertaan modal negara (PMN), yang mana dana segar ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketentuan pendanaan tersebut diatur dalam Pasal 3G Undang-undang (UU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah disahkan DPR RI per Selasa (4/2/2025).

“Modal Badan (Danantara) bersumber dari: a. penyertaan modal negara; dan/atau b. sumber lain,” demikian bunyi Pasal 3G Ayat (1), dikutip Senin (24/2/2025).

PMN yang akan diberikan pemerintah kepada Danantara bisa berupa dana tunai, barang milik negara (BMN), atau saham milik negara pada BUMN.

Adapun, modal Danantara paling sedikit yang ditetapkan pemerintah senilai Rp1.000 triliun. Modal ini dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara atau sumber lainnya.

Tugas Pokok BP Danantara

BP Danantara ditugaskan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN, serta sumber pendanaan lain.

Bersama Menteri BUMN, Danantara membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional. Karena itu, Menteri BUMN akan menempatkan perwakilannya di Danantara, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden.

Perlu diketahui, Holding Investasi atau Perusahaan Induk Investasi merupakan sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan Danantara yang mempunyai tugas mengelola dividen, memberdayakan aset BUMN, serta tugas lain yang ditetapkan oleh menteri dan Danantara.

Sedangkan Holding Operasional atau Perusahaan Induk Operasional mempunyai tugas pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN dan kegiatan usaha lainnya.

Saat melaksanakan tugas berupa pengelolaan dividen, BP Danantara berwenang mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN.

Lalu, menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

Bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional.

Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden. Kemudian, mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

Tak hanya itu, untuk meningkatkan nilai aset, Badan dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kemitraan ini dilaksanakan melalui kuasa kelola atau bentuk kerja sama lain.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” bunyi Pasal 31 Ayat (3). (Feby Novalius)

Sumber: economy.okezone.com

Bahlil: Kampus Jadi Penerima Manfaat Tambang, tetapi Bukan CSR

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan status perguruan tinggi sebagai penerima manfaat dari industri pertambangan tidak sama dengan skema tanggung jawab sosial korporasi atau *corporate social responsibility* (CSR).

“*Enggak lah* kalau CSR itu. Jangan persepsikan CSR. Itu kan hanya untuk kelas terbatas. Saya maunya ada yang lebih dari itu,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (21/2/2025).

Bahlil menjelaskan, sesuai revisi keempat atas Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), perguruan tinggi yang menjadi penerima manfaat wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat menggunakan ‘manfaat’ tersebut untuk kepentingan pengembangan dan riset.

Namun, tegasnya, bukan berarti semua kampus akan mendapatkan manfaat tersebut. “Bagi kampus yang mau saja. Kan banyak juga kampus yang sudah kaya, yang tidak butuh. Kita harus memberikan ruang kepada kampus yang butuh.”

Dia mencontohkan manfaat tambang tersebut dapat diberikan pada perguruan-perguruan tinggi di sekitar wilayah pertambangan seperti di Sulawesi, Maluku, Papua, atau Kalimantan.

“Mereka datang kepada saya beberapa rektornya, memohon kiranya mereka juga bisa mendapatkan akses dalam pemberian beasiswa, kemudian laboratoriumnya, RnD-nya. Itu untuk kemudian mereka bisa dilibatkan,” terangnya.

“Namun, dalam UU itu tidak diberikan ke kampus, tetapi ke BUMN, BUMD, dan perusahaan yang nantinya akan dikerjasamakan untuk kampus mendapat manfaat.”

Bahlil berjanji aturan turunan dari UU Minerba yang baru akan terbit maksimal enam bulan ke depan, termasuk soal kriteria perguruan tinggi yang bisa menjadi penerima manfaat WIUPK.

Banjir Penolakan

Dihubungi secara terpisah, Ketua Badan Kejuruan (BK) Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli mengatakan wacana awal bahwa perguruan tinggi bisa mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) sudah banyak mendapatkan penolakan, baik dari akademisi maupun kalangan masyarakat pada umumnya.

“PT tidak mau hal ini nanti akan menurunkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik dan melahirkan generasi berikutnya yang berkualitas dan menurunkan tingkat kritisnya sebagai salah satu pilar kontrol terhadap kondisi sosial ekonomi bangsa,” ujarnya.

Menurut Rizal, banyak perguruan tinggi yang tidak ingin terlibat dalam bisnis pertambangan lantaran khawatir mereka tidak bisa lagi kritis terhadap kebijakan pemerintah

Untuk itu, pemerintah lantas menarik klausul tersebut dan menjadikan perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat WIUPK, alih-alih pemegang IUP.

“Bisa saja izin tambang yang diberikan kepada perusahaan tertentu nanti diwajibkan memberikan sebagian keuntungannya kepada PT yang ditunjuk. Hal ini akan menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan PT di Tanah Air,” terang Rizal.

Bahkan setelah diubah menjadi ‘sekadar’ penerima manfaat, perguruan tinggi dinilainya masih belum bebas konflik kepentingan di industri pertambangan.

Nantinya, sebut Rizal, pemilihan kriteria perguruan tinggi yang berhak menjadi penerima manfaat dikhawatirkan dapat memunculkan praktik ‘lobi-lobi’ tinggi pimpinan perguruan tinggi kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

Alih-alih menjadikan perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, Rizal menyarankan pemerintah seharusnya mengoptimalkan BUMN dan BUMD untuk mengelola sumber daya alam (SDA) untuk mendapatkan dividen, setoran pajak, dan manfaat lainnya.

“PT diberikan dana yang cukup dan bersumber dari kas negara dengan mekanisme APBN seperti yang selama ini telah terjadi. Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak izin tambang yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana PT yang katakanlah

terakreditasi B misalnya,” ujarnya.

“Selain itu, harus dipertimbangkan juga bahwa kemungkinan dana yang akan didapatkan perguruan tinggi juga kecil atau malah tidak akan mendapatkan bagian dari tambang apabila perusahaan tersebut menurun keuntungannya atau merugi.”

Terlebih, kata Rizal, karakter dari usaha pertambangan adalah berisiko tinggi, padat modal, dan dibarengi dengan volatilitas harga komoditas yang tinggi. “Seperti saat ini harga komoditas batubara dan nikel lagi turun.” -- *Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi (wdh)*

Sumber: bloombergtechnoz.com